



Analisis Historis Dan Fungsional Otoritas Moneter, OJK, Dan LPS Di Sistem Keuangan Indonesia

Nurliana Sianturi

nurliana01sianturi14@gmail.com

Universitas Pelita Bangsa

Japar Arofik

japararofik2@gmail.com

Universitas Pelita Bangsa

Khofifah Kayla Syibillah

kaylasyibillah@gmail.com

Universitas Pelita Bangsa

Eva Agustina Permadi

evaagustinaaa94@gmail.com

Universitas Pelita Bangsa

Korespondensi penulis: *nurliana01sianturi14@gmail.com*

Abstract. *Three main pillars play an important role in Indonesia's financial system, consisting of Bank Indonesia (BI) as the monetary authority, the Financial Services Authority (OJK) as the supervisor of the financial services industry, and the Deposit Insurance Corporation (LPS) as the deposit insurer and resolution of troubled banks. The purpose of this research is to study the historical and functional roles of these three institutions in maintaining the stability of the national financial system. The research found that synergy between BI, OJK, and LPS is essential to face domestic and international economic challenges, using a qualitative-descriptive literature study approach. Through interest rate policy and liquidity management, BI maintains monetary stability, OJK maintains financial sector integrity by overseeing emerging financial technologies, and LPS fosters public confidence in the banking sector through deposit insurance and bank disputes. Strengthening data-driven policies, improving public financial literacy, and stronger cross-sector collaboration are needed to address future challenges such as financial digitalization, economic globalization, and systemic risk. This study is expected to serve as a foundation for policy changes for a more resilient, inclusive, and sustainable Indonesian financial system.*

Keywords: *LPS; OJK; Monetary Authority; Economic Growth; Indonesia's Financial System; Financial*

Abstrak. Tiga pilar utama memainkan peran penting dalam sistem keuangan Indonesia, yang terdiri dari Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas industri jasa keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai penjamin simpanan dan penyelesaian bank bermasalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari peran historis dan fungsional ketiga lembaga ini dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Penelitian ini menemukan bahwa sinergi antara BI, OJK, dan LPS sangat penting untuk menghadapi tantangan ekonomi domestik dan internasional, menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif-deskriptif. Melalui kebijakan suku bunga dan pengelolaan likuiditas, BI menjaga stabilitas moneter, OJK menjaga integritas sektor keuangan dengan mengawasi teknologi finansial yang berkembang, dan LPS menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan melalui jaminan simpanan dan perselisihan bank. Penguatan kebijakan berbasis data, peningkatan literasi keuangan masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat diperlukan untuk mengatasi tantangan ke depan seperti digitalisasi keuangan, globalisasi ekonomi, dan risiko sistemik. Kajian ini diharapkan menjadi landasan bagi perubahan kebijakan sistem keuangan Indonesia yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *LPS; OJK; Otoritas Moneter; Pertumbuhan Ekonomi; Sistem Keuangan Indonesia; Stabilitas Keuangan.*

PENDAHULUAN

Sistem keuangan Indonesia telah mengalami berbagai transformasi seiring dengan dinamika ekonomi, politik, dan sosial yang berkembang dari waktu ke waktu. Dalam perjalanan sejarahnya, sistem ini telah menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari krisis moneter hingga perubahan regulasi yang signifikan. Sistem keuangan nasional sangat bergantung pada otoritas moneter, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ketiga lembaga ini melakukan tugas yang berbeda, tetapi saling terkait untuk membuat lingkungan keuangan yang sehat dan stabil untuk masyarakat dan bisnis. Dalam kasus ini, Bank Indonesia (BI) bertanggung jawab atas kebijakan moneter yang bertujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah serta mengontrol inflasi dan likuiditas ekonomi. Sebagai bank sentral, BI memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan melalui penggunaan instrumen kebijakan seperti pengelolaan cadangan devisa, suku bunga, dan intervensi pasar. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor keuangan, termasuk pasar modal, perbankan, dan industri keuangan non-bank.

OJK didirikan sebagai tanggapan atas kebutuhan akan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan independen dan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan. OJK menerapkan berbagai regulasi dan pengawasan ketat untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar. Dalam menghadapi tantangan digitalisasi keuangan yang terus berkembang, OJK semakin penting. Sebaliknya, melalui mekanisme penjaminan simpanan dan penyelesaian bank bermasalah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Karena keberadaan LPS, dana nasabah tetap terlindungi dalam batas tertentu jika terjadi kegagalan bank, fungsi ini sangat penting untuk mencegah kepanikan di sektor perbankan, terutama ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi yang dapat menyebabkan penarikan dana besar-besaran oleh nasabah. Selain itu, LPS juga berperan dalam restrukturisasi dan penyelesaian bank bermasalah untuk menjaga stabilitas sektor perbankan.

Untuk memastikan sistem keuangan Indonesia berjalan dengan baik dan stabil, ketiga otoritas ini bekerja sama. Sinergi antara BI, OJK, dan LPS memungkinkan kebijakan yang lebih komprehensif dalam menangani berbagai masalah ekonomi, baik domestik maupun internasional.

Kebijakan moneter BI harus sesuai dengan regulasi OJK, sementara LPS menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Ketiga lembaga ini harus bekerja sama dan bekerja sama dengan baik untuk membuat ekosistem keuangan yang tangguh dan responsif. Kajian terhadap ketiga otoritas ini, baik secara historis maupun fungsional, dapat membantu menemukan pola dan taktik yang telah digunakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Diharapkan rekomendasi kebijakan yang lebih inovatif dan efisien dapat dibuat dengan memahami sejarah institusi dan fungsinya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang peran, masalah, dan kemungkinan BI, OJK, dan LPS dalam membangun sistem keuangan Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan. Sistem keuangan Indonesia harus terus beradaptasi dan mengembangkan kebijakan yang dapat dengan cepat dan tepat menanggapi dinamika pasar dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Tiga pilar utama sistem keuangan nasional, BI, OJK, dan LPS, memberikan fondasi yang kuat untuk stabilitas ekonomi. Namun, karena perubahan teknologi finansial, ketidakpastian ekonomi global, dan integrasi ekonomi internasional, ketiga otoritas ini harus terus meningkatkan efektivitas

kebijakan mereka. Dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama di antara ketiga lembaga ini, Indonesia dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih baik.

Selain itu, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang keuangan sangat penting untuk meningkatkan stabilitas sektor keuangan. Kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional dapat ditingkatkan dengan memberikan pendidikan tentang kebijakan moneter, peraturan perbankan, dan perlindungan simpanan LPS. Jika masyarakat lebih memahami fungsi ketiga otoritas ini, diharapkan partisipasi dalam sektor keuangan akan meningkat, yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran, masalah, dan prospek kebijakan yang diterapkan oleh BI, OJK, dan LPS. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan rekomendasi strategis yang akan membantu memperkuat sistem keuangan Indonesia di masa depan. Penting bagi ketiga lembaga sistem keuangan Indonesia—Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)—untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan masalah yang berkembang jika mereka ingin memperkuat sistem keuangan Indonesia di masa depan. Penguatan kebijakan makprudensial yang lebih responsif terhadap gejala ekonomi global adalah salah satu langkah strategis yang dapat diambil. Dengan menerapkan regulasi yang lebih fleksibel dan berbasis data, BI dapat menjaga stabilitas moneter tanpa menghentikan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, OJK harus memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mengantisipasi bahaya yang muncul sebagai akibat dari pertumbuhan fintech dan ekonomi digital.

Selain itu, lembaga keuangan harus bekerja sama lebih baik melalui sistem yang lebih baik untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Untuk membuat respon terhadap situasi ekonomi lebih cepat dan akurat, Indonesia dapat mengembangkan platform berbasis teknologi yang memungkinkan pertukaran data secara real-time antara BI, OJK, dan LPS. Pendekatan berbasis big data dan kecerdasan buatan (AI) juga dapat menjadi alat penting untuk menemukan pola dan tren yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi pada sektor keuangan dan perekonomian secara keseluruhan, strategi mitigasi risiko dapat diterapkan lebih awal.

METODE PENELITIAN

Untuk menyelidiki peran dan fungsi Otoritas Moneter, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam sistem keuangan Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. Studi literatur adalah metodologi yang berpusat pada pengumpulan dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal akademik, peraturan pemerintah, dan laporan resmi dari institusi yang relevan. Metode ini memungkinkan para peneliti untuk memahami evolusi historis dan fungsi ketiga otoritas tersebut. Mereka juga dapat mempelajari kebijakan yang telah digunakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Untuk mengumpulkan data, sejumlah literatur yang relevan diperiksa secara menyeluruh.

Sumber yang digunakan dipilih berdasarkan kredibilitas dan relevansi, dengan mempertimbangkan publikasi dari institusi resmi seperti Bank Indonesia, OJK, dan LPS, serta jurnal ilmiah yang membahas topik ekonomi dan keuangan. Selain itu, analisis juga mencakup evaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur operasi ketiga otoritas ini. Akibatnya, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana peraturan dan kebijakan yang berlaku mempengaruhi kinerja dan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Untuk memahami hubungan antara kebijakan moneter, regulasi keuangan, dan mekanisme penjaminan simpanan, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menganalisis data.

Untuk melakukan ini, setiap hasil dari berbagai sumber literatur dipelajari dan ditafsirkan. Metode analisis yang digunakan mencakup pembagian informasi berdasarkan waktu, fungsi institusi, dan pengaruh kebijakan terhadap industri keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan pendekatan yang telah digunakan untuk menghadapi tantangan ekonomi dan menawarkan wawasan untuk pengembangan kebijakan di masa depan dengan membandingkan berbagai perspektif dari literatur yang ada. Studi ini akan memberikan rangkuman teoritis yang menghubungkan berbagai konsep dan temuan yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan akademik yang kuat dan analisis mendalam yang dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi di bidang ekonomi dan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang perkembangan regulasi dan kebijakan keuangan di Indonesia serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung penguatan sistem keuangan nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evolusi Otoritas Moneter dalam Stabilitas Ekonomi

Berdasarkan laporan resmi Bank Indonesia (bi.go.id), Juni 2024 Kebijakan suku bunga acuan bank Indonesia secara aktif mengontrol inflasi. Untuk mengatasi tekanan inflasi dan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia menetapkan suku bunga 6,25% pada Juni 2024. Selain itu, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar USD 139,2 miliar pada Mei 2024, yang cukup untuk mendanai impor dan pembayaran utang luar negeri selama 6,2 bulan. Ini merupakan tanda kuat stabilitas moneter negara. Otoritas moneter sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, termasuk Indonesia. Kebijakan moneter telah berubah untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi nasional dan global sejak Bank Indonesia (BI) didirikan sebagai bank sentral. Pada awalnya, BI berfungsi sebagai regulator utama yang menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mengawasi stabilitas nilai tukar, inflasi, dan tingkat suku bunga.

BI menjadi semakin kompleks seiring berjalannya waktu, terutama dalam menghadapi masalah seperti krisis keuangan, volatilitas pasar global, dan perubahan dalam struktur ekonomi domestik yang mengganggu stabilitas sistem keuangan Indonesia. Selama sejarahnya, otoritas moneter Indonesia telah mengalami berbagai transformasi kebijakan. Saat Indonesia menghadapi krisis moneter tahun 1997-1998, yang menimbulkan tekanan besar terhadap nilai tukar rupiah dan stabilitas perbankan nasional, itu adalah momen penting. Krisis tersebut menunjukkan seberapa efektif kebijakan moneter dalam mengatasi gejolak ekonomi, mendorong BI untuk menjadi lebih fleksibel dalam menentukan suku bunga dan mengelola cadangan devisa. Setelah krisis, fokus kebijakan moneter beralih ke pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis data. Selain itu, reformasi kebijakan juga dilakukan untuk membuat BI lebih transparan dan lebih independen dalam menetapkan kebijakan ekonomi.

Seiring berjalannya waktu, otoritas moneter terus mengadopsi instrumen kebijakan yang lebih canggih. Kebijakan operasi pasar terbuka dan suku bunga acuan, yang digunakan untuk mengontrol inflasi dan menjaga ekonomi stabil, adalah salah satu strategi utama yang digunakan. Selain itu, digitalisasi keuangan yang semakin berkembang mengubah pendekatan BI untuk menjalankan peranannya. Ini termasuk mengatur sistem keuangan berbasis teknologi dan ekosistem pembayaran digital. Untuk menciptakan kondisi ekonomi yang baik dan berdaya tahan, bank Indonesia juga berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas makroekonomi dengan memperkuat kerja sama dengan pemerintah dan sektor perbankan. Kemampuan BI untuk menangani tantangan baru yang muncul, seperti ketidakpastian ekonomi global dan dampak digitalisasi keuangan, sangat penting untuk keberlanjutan kebijakan moneter Indonesia. BI

berusaha memastikan bahwa sistem keuangan nasional tetap stabil dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan terus menilai dan menyesuaikan kebijakan yang diterapkan. Ketika otoritas moneter, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama, mereka membentuk ekosistem keuangan yang tangguh yang dapat dengan lebih efisien menanggapi perubahan ekonomi.

Seiring dengan dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, BI perlu terus mengembangkan kebijakan yang responsif dan adaptif untuk menangani berbagai masalah yang muncul. Dalam membuat kebijakan moneter ke depan, hal-hal yang harus dipertimbangkan termasuk digitalisasi keuangan, pergeseran gaya hidup konsumen, dan peningkatan integrasi ekonomi internasional. Selain itu, kerja sama yang erat dengan OJK dan LPS harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan sektor keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. BI dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dengan menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur dan berbasis data. Selain reformasi kebijakan, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang keuangan juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Memahami kebijakan suku bunga, inflasi, dan mekanisme stabilisasi nilai tukar dapat membantu orang dan bisnis membuat keputusan ekonomi yang lebih cerdas. Oleh karena itu, kerja sama antara otoritas moneter, regulator keuangan, dan lembaga penjamin simpanan tidak hanya memperhatikan stabilitas ekonomi makro tetapi juga dampak pada kesejahteraan masyarakat. Sistem keuangan Indonesia memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan jika ada strategi yang tepat dan koordinasi yang baik.

Bank Indonesia (BI) harus terus mengembangkan kebijakan moneter yang mengikuti perkembangan global dan teknologi finansial untuk memperkuat sistem keuangan Indonesia di era modern. Penguatan kebijakan suku bunga yang lebih adaptif dalam menghadapi tekanan inflasi dan volatilitas pasar adalah komponen penting. BI dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Selain itu, bisnis informasi (BI) harus berpartisipasi secara aktif dalam mendorong inklusi keuangan dengan memberikan layanan keuangan yang lebih luas kepada kelompok masyarakat yang saat ini tidak memiliki akses ke sistem perbankan konvensional. Sebaliknya, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, kerja sama antara Bank Informasi (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus diperkuat.

Sinergi antara regulator keuangan dan moneter dapat membantu menciptakan ekosistem yang lebih kuat untuk menangani risiko yang muncul dari kedua industri perbankan dan non-bank. Ketiga lembaga ini dapat meningkatkan efisiensi pemantauan pasar dan pengambilan keputusan mereka dengan memanfaatkan teknologi digital dan analitik data yang lebih canggih. Selain itu, langkah ini akan meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia terhadap ancaman dari luar, seperti gejolak ekonomi global dan perubahan kebijakan internasional.

Transformasi Regulasi dan Pengawasan oleh OJK

Berdasarkan sumber dari OJK Annual Report 2024, survey SNLIK OJK telah mengawasi 102 perusahaan fintech resmi hingga April 2024, menunjukkan kesulitan dan kebutuhan regulasi yang fleksibel di era digital. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, literasi keuangan masyarakat juga meningkat dari 38,03% pada tahun 2019 menjadi 49,68% pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan peran program OJK dalam meningkatkan pengetahuan publik tentang sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah regulator dan pengawas

utama sektor keuangan Indonesia, yang mencakup perbankan, pasar modal, dan sektor keuangan non-bank. Reformasi sistem keuangan yang bertujuan untuk menciptakan pengawasan yang lebih terintegrasi dan mandiri adalah dasar dari keberadaan OJK. Sebelum OJK dibentuk, sektor keuangan diawasi oleh berbagai lembaga yang berbeda, yang menyebabkan ketidaksepakatan dalam penerapan regulasi.

OJK didirikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan tujuan mendorong stabilitas dan kemajuan industri keuangan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. OJK melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pengawasan dan menjaga integritas sistem keuangan nasional. Pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dan memiliki struktur permodalan yang kuat merupakan kebijakan utama. Selain itu, OJK aktif mengembangkan regulasi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal, termasuk melindungi investor dan meningkatkan pengetahuan keuangan. OJK juga menghadapi tantangan digitalisasi industri keuangan, sehingga mereka terus beradaptasi dengan mengeluarkan regulasi terkait teknologi finansial (fintech) untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi kedua pelaku industri dan konsumen.

OJK juga memiliki otoritas untuk menangani masalah yang muncul dalam sistem keuangan dan mencegah kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan fraud. Metode pengawasan OJK termasuk pendekatan berbasis risiko, yang memungkinkan pengenalan masalah keuangan yang mungkin terjadi sebelum menjadi krisis sistemik. Selain itu, OJK sering bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan pemerintah, untuk membuat kebijakan yang lebih efisien yang mendorong pertumbuhan ekonomi. OJK menggunakan strategi ini untuk mengimbangi regulasi yang ketat dengan fleksibilitas sektor keuangan. OJK akan menghadapi banyak tantangan di masa depan, terutama karena digitalisasi layanan keuangan semakin meningkat dan dinamika ekonomi global yang dapat memengaruhi stabilitas sektor keuangan domestik. Akibatnya, OJK harus terus meningkatkan regulasi dan pengawasannya serta bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. OJK sangat penting untuk memastikan bahwa sektor keuangan tetap responsif terhadap perubahan sambil melindungi kepentingan masyarakat dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global melalui pendekatan yang adaptif dan berbasis data.

Untuk tetap efektif di era digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mempertahankan stabilitas sistem keuangan sambil menerima inovasi. Salah satu elemen penting adalah penguatan regulasi untuk fintech dan digital banking, karena kemajuan teknologi telah mengubah cara orang menggunakan layanan keuangan. OJK harus menjaga keamanan dan kepercayaan ekosistem digital keuangan dengan meningkatkan pengawasan terhadap transaksi elektronik dan melindungi data konsumen untuk mengurangi bahaya siber. OJK dapat mengembangkan industri keuangan digital tanpa mengabaikan kehati-hatian dengan menggunakan regulasi yang fleksibel namun ketat.

Selain itu, untuk meningkatkan ketahanan sektor keuangan terhadap perubahan ekonomi global, OJK harus bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). OJK dapat merespons lebih cepat terhadap indikasi risiko sistemik yang dapat mengancam stabilitas perbankan dan pasar keuangan dengan membangun sistem pemantauan yang lebih kompleks dan berbasis teknologi. Dalam menghadapi potensi krisis keuangan, pendekatan berbasis data dan AI juga dapat menjadi cara yang bagus untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan mempercepat pengambilan keputusan.

Peran LPS dalam Menjaga Kepercayaan Publik terhadap Perbankan

Berdasarkan laporan statistic LPS, Semester I 2024 jumlah maksimal simpanan yang dapat dijamin LPS untuk setiap nasabah hingga Juni 2024 adalah Rp2 miliar per bank. LPS saat ini menjamin simpanan di lebih dari 106 bank umum dan 1.500 BPR/BPRS, memberikan jangkauan perlindungan yang luas. Bunga penjaminan, yang ditetapkan pada 4,25% untuk bank umum dan 6,75% untuk BPR, menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan dan menjaga sistem perbankan stabil adalah tugas penting lembaga penjamin simpanan (LPS). LPS menjamin simpanan nasabah di bank yang terdaftar dalam skema penjaminan, sehingga dana masyarakat tetap terlindungi dalam batas tertentu apabila bank mengalami kegagalan.

LPS sangat penting untuk mengurangi risiko bank run, yaitu ketika pelanggan menarik dana secara massal karena tidak percaya pada sistem perbankan. Dengan adanya jaminan simpanan, LPS memperkuat sistem keuangan dan meningkatkan rasa aman bagi mereka yang menyimpan dana di perbankan. Selain menjalankan tugas penjaminan simpanan, LPS juga ditugaskan untuk menangani dan menyelesaikan bank bermasalah melalui mekanisme penyelesaian. LPS dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seperti restrukturisasi, pengambilalihan, atau likuidasi bank, jika bank mengalami masalah likuiditas atau tidak dapat memenuhi kewajiban kepada nasabahnya. Tujuan dari proses ini adalah untuk menjaga stabilitas sektor perbankan dan menghindari efek sistemik yang dapat mengganggu ekonomi nasional. Oleh karena itu, LPS berfungsi sebagai penjaga terakhir dalam sistem keuangan untuk memastikan bahwa kegagalan bank tertentu tidak menyebabkan krisis keuangan yang lebih besar.

LPS terus beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan kebijakan moneter selama menjalankan fungsinya. Memastikan bahwa skema penjaminan simpanan tetap relevan dengan perkembangan industri perbankan, seperti munculnya perbankan digital dan inovasi dalam sistem pembayaran, adalah masalah utama. Selain itu, untuk mengawasi kondisi perbankan dan mengantisipasi krisis keuangan, otoritas keuangan harus bekerja sama dengan baik dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Dengan kolaborasi yang kuat antara otoritas keuangan, LPS dapat lebih efisien dalam menjalankan mandatnya serta mengurangi efek buruk dari ketidakstabilan sektor perbankan. Untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks ke depan, LPS harus terus memperkuat mekanisme penjaminan simpanan dan resolusi bank. Kebijakan yang adaptif dan berbasis data diperlukan untuk menangani risiko baru yang ditimbulkan oleh digitalisasi dan integrasi keuangan global. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang keuangan juga sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada nasabah tentang hak dan perlindungan mereka dalam sistem perbankan. LPS dapat terus menjaga stabilitas perbankan dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dalam jangka panjang jika digunakan dengan benar.

Selain menjaga stabilitas sektor perbankan, LPS harus mengembangkan mekanisme yang lebih proaktif untuk mengantisipasi krisis keuangan yang mungkin terjadi. Penguatan sistem penyelesaian bank harus berfokus pada identifikasi kelemahan struktural perbankan dan penerapan strategi penanganan yang lebih efisien. Oleh karena itu, LPS tidak hanya membantu bank ketika mereka gagal, tetapi juga menjaga sistem perbankan tetap stabil sebelum masalah muncul. Selain itu, langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan adalah meningkatkan transparansi dan informasi tentang skema penjaminan simpanan.

Sinergi dan Interaksi BI, OJK, dan LPS dalam Stabilitas Keuangan

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama. Ketiga lembaga ini

membentuk sistem regulasi dan pengawasan yang menjaga stabilitas dan kinerja sektor keuangan. Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks seperti krisis finansial, perubahan kebijakan global, dan digitalisasi sektor keuangan, kerja sama antara BI, OJK, dan LPS menjadi sangat penting. Ketiga otoritas ini dapat bekerja sama dengan baik untuk menyelaraskan kebijakan moneter, pengawasan keuangan, dan sistem penjaminan simpanan untuk mencegah ketidakstabilan yang dapat memengaruhi ekonomi nasional. Sementara OJK mengawasi sektor keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan fintech, BI bertanggung jawab untuk membuat kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah. Biasanya, BI dan OJK bekerja sama dalam koordinasi kebijakan untuk memastikan bahwa pengaturan sektor keuangan selaras dengan kebijakan moneter. Misalnya, ketika BI menerapkan kebijakan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi, OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dampak kebijakan tersebut terhadap industri perbankan tetap terkendali. Kebijakan moneter yang diterapkan secara tidak terkoordinasi dapat mengganggu stabilitas keuangan, yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian yang matang.

Sebaliknya, LPS bertanggung jawab atas penyelesaian bank bermasalah dan menjamin simpanan. LPS bekerja sama dengan BI dan OJK untuk memantau kondisi perbankan dan merancang strategi untuk mengatasi masalah yang dapat mengganggu sistem perbankan nasional dalam rangka stabilitas keuangan. Salah satu contoh nyata dari sinergi ini adalah mekanisme koordinasi yang digunakan untuk menangani bank yang mengalami masalah likuiditas. OJK memastikan bahwa bank tetap mengikuti prinsip kehati-hatian, sementara LPS bertindak sebagai pelindung terakhir dalam menjamin dana nasabah agar tidak terpengaruh oleh kegagalan sistem perbankan. BI dapat memberikan dukungan likuiditas melalui instrumen moneter. Bagaimana ketiga otoritas ini bekerja sama untuk mengatasi perubahan ekonomi yang terus-menerus sangat penting untuk keberlanjutan stabilitas keuangan Indonesia. Sistem keuangan nasional dapat menjadi lebih tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan jika ada komunikasi yang intens, koordinasi kebijakan yang kuat, dan mekanisme respons yang cepat terhadap perubahan ekonomi. Ke depan, kolaborasi ini harus diperkuat, terutama dalam menghadapi era digitalisasi keuangan dan meningkatnya kompleksitas risiko global yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.

Penting bagi BI, OJK, dan LPS untuk terus berinovasi dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks selain meningkatkan koordinasi kebijakan. Dengan digitalisasi keuangan, pergeseran gaya hidup konsumen, dan ketidakpastian ekonomi global, pendekatan perumusan kebijakan yang lebih fleksibel dan berbasis data diperlukan. Untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, langkah strategis lainnya adalah meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauan risiko. Ketiga otoritas ini dapat menggunakan pendekatan yang lebih adaptif untuk membuat kebijakan yang tidak hanya menjaga keseimbangan makroekonomi tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan partisipasi publik dalam sektor keuangan secara aman dan bertanggung jawab, pendidikan dan pengetahuan keuangan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Orang-orang yang tahu tentang kebijakan moneter, peraturan perbankan, dan sistem penjaminan simpanan akan lebih mampu mengatasi perubahan ekonomi. Oleh karena itu, otoritas keuangan dan berbagai pemangku kepentingan dalam regulasi dan pendidikan publik harus terus bekerja sama. Sistem keuangan Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jika dilakukan dengan cara yang tepat dan koordinasi yang baik.

Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) perlu meningkatkan strategi pengawasan dan kebijakan keuangan berbasis teknologi untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Tiga lembaga ini memiliki kemampuan untuk menganalisis pola transaksi, menemukan potensi risiko, dan memperbaiki ancaman stabilitas keuangan dengan menggunakan big data dan kecerdasan buatan. Digitalisasi meningkatkan efisiensi regulasi dan memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap perubahan ekonomi domestik dan pasar global.

Implikasi Kebijakan dan Prospek Penguatan Sistem Keuangan Nasional

Menurut Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2023, yang dirilis oleh Kominfo, pilar keterampilan digital menerima skor 49,35, sedangkan skor nasional hanya 43,18 dari skala 100. Ini menunjukkan bahwa literasi digital harus dimasukkan ke dalam kebijakan BI, OJK, dan LPS agar partisipasi publik dan daya tahan sistem keuangan diperkuat. Sistem keuangan Indonesia sangat stabil berkat kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sektor keuangan dan ekonomi secara keseluruhan dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan yang dibuat oleh ketiga otoritas ini.

Kebijakan BI seperti stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi memengaruhi daya beli masyarakat dan iklim usaha. Sementara itu, peraturan OJK yang mengawasi sektor keuangan memengaruhi perlindungan konsumen dan kelangsungan bisnis perbankan dan pasar modal. Sebaliknya, mekanisme penjaminan simpanan yang dikelola oleh LPS melindungi nasabah dan mencegah ketidakstabilan di sektor perbankan. Kebijakan yang telah diterapkan harus terus dievaluasi untuk memastikan ketahanan ekonomi. Dalam pembuatan kebijakan baru, digitalisasi keuangan dan globalisasi harus diperhatikan. Ketika teknologi finansial (fintech), sistem pembayaran digital, dan model bisnis baru muncul dalam industri keuangan, diperlukan regulasi yang fleksibel namun tegas untuk memastikan sistem stabil. Oleh karena itu, regulasi baru harus dibuat untuk memungkinkan pertumbuhan industri keuangan digital tanpa mengorbankan integritas sistem keuangan dan keamanan konsumen. Untuk menghadapi perubahan global yang dapat memengaruhi pergerakan ekonomi nasional, sinergi antara BI, OJK, dan LPS juga harus diperkuat.

Kemampuan otoritas untuk membuat kebijakan yang dapat disesuaikan dan berbasis data sangat penting untuk prospek peningkatan sistem keuangan nasional. Salah satu tindakan yang harus diprioritaskan adalah reformasi struktural industri keuangan, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang keuangan, dan meningkatkan koordinasi antar institusi. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga keuangan non-bank sangat penting. Indonesia dapat membangun sistem keuangan yang lebih tangguh dan responsif terhadap tantangan ekonomi yang terus berkembang dengan meningkatkan regulasi dan pemantauan. Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan akan menjadi tantangan utama bagi sistem keuangan Indonesia ke depan. Kebijakan yang lebih luas dan komprehensif harus dihadapi dengan krisis global, perubahan kebijakan internasional, dan peningkatan risiko sistemik di sektor keuangan. Oleh karena itu, untuk menciptakan ekosistem keuangan yang berkelanjutan, pendekatan yang berfokus pada penguatan dasar ekonomi, peningkatan transparansi regulasi, dan kerja sama yang erat antara BI, OJK, dan LPS sangat penting. Dalam menghadapi perubahan yang terjadi di seluruh dunia, Indonesia memiliki kemampuan untuk terus memperkuat stabilitas ekonominya dan meningkatkan daya saing sektor keuangan melalui tindakan strategis yang tepat.

Selain menjaga kebijakan dan regulasi yang kuat, sistem keuangan Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan ekonomi. Response yang cepat dan

strategis dari BI, OJK, dan LPS diperlukan karena tren baru seperti digitalisasi keuangan, penggunaan mata uang digital, dan integrasi ekonomi global. Selain itu, pengembangan kebijakan harus memprioritaskan pembangunan ekosistem keuangan yang inklusif, yang memungkinkan akses yang lebih luas dan merata ke layanan keuangan. Oleh karena itu, sistem keuangan di Indonesia tidak hanya stabil tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Ke depan, hubungan antara ketiga otoritas ini harus diperkuat melalui kebijakan yang berbasis data dan kolaborasi dengan industri dan lembaga pendidikan untuk membuat solusi inovatif untuk masalah ekonomi. Menjaga kepercayaan masyarakat dan pelaku industri memerlukan peningkatan transparansi kebijakan keuangan. Dengan menerapkan pendekatan yang tepat, Indonesia memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa sistem keuangan negaranya tetap stabil di tengah transformasi ekonomi global sekaligus memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan semakin kompleksnya tantangan ekonomi global, Indonesia harus terus berinovasi dalam merancang kebijakan yang dapat merespons dinamika pasar secara efektif. Sinergi antara BI, OJK, dan LPS harus semakin diperkuat untuk menghadapi risiko sistemik yang mungkin muncul akibat perubahan struktur ekonomi global dan perkembangan teknologi finansial. Regulasi yang fleksibel tetapi tegas dalam menjaga stabilitas keuangan menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang tantangan ekonomi global. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang keuangan juga akan sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan industri keuangan. Pendidikan yang lebih luas tentang regulasi perbankan, mekanisme moneter, dan perlindungan simpanan dapat membantu orang membuat pilihan ekonomi yang lebih cerdas. Sistem keuangan Indonesia dapat terus berkembang, menghadapi tantangan global dengan lebih siap, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif.

Inovasi kebijakan dan regulasi harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa sistem keuangan Indonesia tetap tangguh dan mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi global untuk tetap stabil. Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus bekerja sama untuk membuat kebijakan berbasis data yang dapat menangani masalah seperti kemajuan teknologi finansial, perubahan perilaku konsumen dalam transaksi keuangan digital, dan fluktuasi ekonomi global. Sistem keuangan nasional dapat menghadapi risiko dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap hati-hati.

Tabel data pendukung historis dan fungsional dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam sistem keuangan Indonesia

Lembaga	Peran Historis	Fungsi Utama Saat Ini	Data Pendukung
Bank Indonesia (BI)	Didirikan sebagai bank sentral sejak 1953. Mengalami reformasi pasca krisis 1997/1998 untuk menjadi lebih independen dan transparan.	Menjaga stabilitas moneter melalui kebijakan suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Mengelola cadangan devisa dan sistem pembayaran nasional.	Suku bunga acuan BI: 6,25% (Juni 2024). Inflasi tahunan: 2,61% (2023). Cadangan devisa: USD 139,2 miliar (Mei 2024).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Dibentuk melalui UU No. 21 Tahun 2011 sebagai respons atas	Mengawasi sektor jasa keuangan: perbankan, pasar modal, dan IKNB.	Literasi keuangan nasional: 49,68% (2022). Fintech

	kebutuhan pengawasan keuangan yang terpadu. Menggantikan fungsi pengawasan keuangan dari Bi dan Bapepam-LK.	Melindungi konsumen dan meningkatkan literasi keuangan. Mengatur fintech dan digital banking.	terdaftar: 102 entitas (April 2024). Lembaga keuangan diawasi: lebih dari 2.000 entitas.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Didirikan pasca krisis 1998 melalui UU No. 24 Tahun 2004 untuk menjamin simpanan nasabah dan menangani bank bermasalah.	Menjamin simpanan nasabah hingga Rp2 miliar. Menangani resolusi bank bermasalah melalui likuidasi atau restrukturisasi. Menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.	Simpanan dijamin: hingga Rp2 miliar per nasabah. Tingkat bunga penjaminan: 4,25% untuk bank umum dan 6,75% untuk BPR (Juni 2024). Bank peserta: 106 bank umum dan lebih dari 1.500 BPR/BPRS.

KESIMPULAN

Dari krisis moneter hingga perubahan regulasi keuangan, sistem keuangan Indonesia telah mengalami banyak perubahan dalam sejarahnya. Ketiga lembaga utama yang bertanggung jawab atas stabilitas ekonomi nasional adalah Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). BI menangani kebijakan moneter seperti pengendalian inflasi dan nilai tukar, OJK mengawasi sektor jasa keuangan, dan LPS menjamin simpanan masyarakat dan menangani masalah bank yang bermasalah. Masing-masing lembaga menjalankan tugas yang berbeda tetapi saling terkait, membentuk ekosistem keuangan yang saling melengkapi. Pasca-krisis 1997/1998, bank Indonesia telah mengalami perubahan kebijakan besar. Perubahan ini menandai pergeseran BI dari kebijakan moneter konvensional ke pendekatan berbasis data yang lebih fleksibel. Untuk menjaga kestabilan ekonomi, BI sekarang menggunakan instrumen kontemporer seperti pengelolaan suku bunga acuan dan operasi pasar terbuka. Digitalisasi ekonomi juga mendorong BI untuk mengubah peranannya dalam mengatur sistem pembayaran dan mengantisipasi risiko yang berasal dari inovasi teknologi finansial. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan dengan tujuan untuk membangun sistem pengawasan keuangan yang independen dan terpadu. OJK mengawasi dan meregulasi perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Mereka telah mengembangkan regulasi yang fleksibel untuk memastikan lingkungan keuangan yang aman dan inovatif di tengah perkembangan fintech dan digital banking. OJK menggunakan pendekatan berbasis risiko dan teknologi untuk menemukan dan menangani potensi ancaman stabilitas keuangan sebelum menjadi krisis sistemik.

Dengan skema penjaminan simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berfungsi sebagai penjaga terakhir sistem perbankan. Fungsi ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, terutama saat ekonomi bergejolak. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, LPS juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan bank bermasalah melalui mekanisme restrukturisasi dan likuidasi. Agar LPS dapat menjalankan mandatnya secara efisien dan tepat waktu, kerja sama yang erat dengan BI dan OJK diperlukan. Untuk menjaga stabilitas keuangan nasional, ketiga otoritas keuangan

ini sangat bergantung pada kerja sama satu sama lain. BI, OJK, dan LPS harus berkolaborasi secara strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi seperti digitalisasi sektor keuangan, krisis global, dan gejolak nilai tukar. Daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap risiko sistemik dan eksternal akan diperkuat dengan perubahan kebijakan moneter, pengawasan regulasi, dan mekanisme penjaminan simpanan. Kebijakan yang dibuat dapat lebih menyeluruh dan responsif dengan bekerja sama.

Inovasi yang mengintegrasikan teknologi seperti big data dan artificial intelligence dalam sistem pengawasan dan pengambilan keputusan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan keuangan. Selain itu, ketiga lembaga harus membangun infrastruktur pertukaran data yang real-time dan transparan untuk merespons risiko ekonomi secara cepat dan akurat. Selain itu, agar sektor keuangan dapat tumbuh sehat tanpa kehilangan keuntungan, pendekatan regulasi yang lebih fleksibel namun tetap bijaksana diperlukan. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang keuangan sangat penting untuk meningkatkan stabilitas keuangan jangka panjang. Pendidikan publik tentang kebijakan moneter, regulasi perbankan, dan perlindungan simpanan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Jika masyarakat mengetahui posisi mereka dalam ekosistem keuangan, mereka akan lebih cerdas dalam membuat keputusan keuangan dan lebih siap menghadapi risiko ekonomi. Ketiga otoritas dapat meningkatkan keterlibatan publik dalam industri keuangan nasional melalui program pendidikan yang luas dan terorganisir. Dengan globalisasi, transformasi digital, dan transformasi struktur ekonomi, sistem keuangan Indonesia akan menghadapi banyak tantangan di masa depan. Akibatnya, BI, OJK, dan LPS harus terus menyesuaikan kebijakan dan meningkatkan kerja sama lintas sektor. Industri keuangan memerlukan reformasi struktural, pengawasan yang lebih baik, dan regulasi yang diperkuat. Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun sistem keuangan yang inklusif, tahan krisis, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang jika menggunakan pendekatan yang strategis dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. N., Yunitasari, L., & Astuti, R. P. (2025). Pengaruh Kebijakan Moneter Bank Sentral Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 293-296.
- Alfarizi, M., Hanum, R. K., Firmansyah, A. A., & Wusqo, U. (2023). Digital Banking Dalam Akselerasi Pemberdayaan Ekonomi Womenpreneur Indonesia: Eksplorasi Sosial-Ekonomi Dan Peran LPS Berbasis PLS-SEM. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 2(2), 1-32.
- Arqam, M., Saputra, M. A., Rifaldi, A., Kahfi, A. A., & Syarif, M. (2024). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Nas Media Pustaka.
- Azky, S., Anita, R., & Oktaviani, N. R. (2024). PERANAN KEBIJAKAN MONETER DALAM MENJAGA STABILITAS PEREKONOMIAN NASIONAL. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 34-39.
- Bank Indonesia. (2024). Laporan Kebijakan Moneter Juni 2024. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter>
- Bank Indonesia. (2024). Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) Mei 2024. <https://www.bi.go.id/id/statistik/seki>
- Bisdan Sigalingging, S. H. (2024). *Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. umsu press.

- Damayanti, D., Nisriina, N. H., Amelia, W., & Sofiani, V. (2024). Lembaga yang terkait dengan lembaga keuangan.
- Faizah, E. F. N., & Jegapu, M. P. (2024). Analisis Hukum Kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) Dalam Menjaga Stabilitas Perbankan. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(6), 306-312.
- Faizah, E. F. N., & Jegapu, M. P. (2024). Analisis Hukum Kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) dalam Menjaga Stabilitas Perbankan. *Journal Sains Student Research*, 2(6), 306–312.
- Faizah, N., Ratih, D., Mafudloh, K. E. A., & Abadi, M. T. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan. *JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT*, 2(1), 135-144.
- Ghofur, A. (2021). Rekontruksi Regulasi Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Untuk Meningkatkan Kesehatan Perbankan Berbasis Nilai Keadilan. ProQuest Dissertations Publishing.
- Harun, N. M. Analisis Perbandingan Prediksi Financial Distress Menggunakan Metode Grover Pada Bank Umum Syariah Di Asia Tenggara Periode 2019-2023 (Bachelor's thesis, FEB UIN JAKARTA).
- Heriyadi, H. (2023). Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 15(2), 87–102. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/40593
- Hitalessy, Y. S. K., Hakim, P. B. N., & Fatihah, K. I. (2025). Peran Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dan Bank Indonesia (Bi) Dalam Proses Likuidasi Bank. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6. B), 198-208.
- Isti'annah, I. (2024). Analisis peramalan pembiayaan sektor usaha Bank Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Katsirin, K. (2024). Meninjau Efektivitas Program Penjaminan Lps Dalam Menjaga Stabilitas Dan Kepercayaan Dalam Sistem Keuangan. *Sebi: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 47-53.
- Koni, A., Rusmana, F. D., Setiadi, R., Apriana, A., Wahrudin, U., Sumarna, A., ... & Hatta, I. M. (2024). LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK & NON BANK.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2024). Statistik Penjaminan Semester I 2024. <https://www.lps.go.id/statistik>
- Lubis, A. H., Andriyani, D., Anggreini, M., & Batubara, M. (2024). PERAN BANK SENTRAL DALAM MENSTABILKAN MONETER. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(6).
- Lubis, A. H., Andriyani, D., Anggreini, M., & Batubara, M. (2024). Peran Bank Sentral dalam Menstabilkan Moneter. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(6), 112–120.
- Purba, D., Panjaitan, S., Gultom, T., Sembiring, N., Lumbangaol, Y., Damanik, L., ... & Siallagan, H. (2024). Peran Bank Sentral Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 7(1), 380-391.
- Ramadhan, F., Ndraha, P. B. H., Irwansyah, M., Dewi, S. P., & Afriyanti, C. A. (2024). Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi, Keuangan dan Moneter Berdasarkan Prinsip Syariah. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, 2(1), 194-205.

- Riyanto, A., Santoso, B., Paraningtyas, P., & Albar, R. A. H. (2023). UU P2SK DAN PENGARUHNYA TERHADAP MODEL PENGAWASAN OJK: TWIN PEAKS SEBUAH ALTERNATIF. *Mimbar Hukum*, 35, 257-284.
- Riyanto, A., Santoso, B., Paraningtyas, P., & Albar, R. A. H. (2023). UU P2SK dan Pengaruhnya terhadap Model Pengawasan OJK: Twin Peaks Sebuah Alternatif. *Mimbar Hukum*, 35, 257–284.
- Rustam, B. R. (2024). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.
- Samosir, A. (2023). *Rekonstruksi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Untuk Meningkatkan Kebijakan Perbankan Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Sari, Y. (2024). Kebijakan Moneter Islam Dalam Upaya Mengendalikan Inflasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 621-626.
- Suhardiono, S., Sembel, R., & Suwandi, S. (2025). Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjaga Stabilitas Sektor Perbankan di Indonesia: Systematic Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 9(1), 146-155.
- Suhardiono, S., Sembel, R., & Suwandi, S. (2025). Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjaga Stabilitas Sektor Perbankan di Indonesia: Systematic Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 9(1), 146–155.
- Suryana, A., Rukmana, H. S., & Vikaliana, R. (2025). *MANAJEMEN RISIKO INVESTASI DAN KEUANGAN*. Penerbit Widina.
- Wowor, M. G., Tinangon, E. N., & Karwur, G. (2025). ANALISIS PERAN PENGAWASAN BANK INDONESIA UNTUK MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN. *LEX ADMINISTRATUM*, 13(1).